

ABSTRAK

FITRA YUNIASTRI PUTRI. 2022. *Agenda Setting Kebijakan Omnibus Law dalam Perspektif Framing Program Tv Mata Najwa* (dibimbing oleh Nasrul Haq, S.Sos., MPA dan Wardah, S.Sos., M.A)

Perdebatan yang timbul akibat pembentukan dan pengesahan *omnibus law* yang dinilai terburu-buru serta adanya pasal-pasal yang merugikan pihak buruh dan pekerja menjadi faktor besarnya gerakan kritikan publik terhadap pemerintah. Penelitian ini diusung dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui tahapan *media agenda* pada *agenda setting* kebijakan *omnibus law*. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis *framing* menurut Robert M Entman yang terdiri atas 4 elemen yakni *define problem*, *diagnose cause*, *make moral judgment*, dan *treatment recommendation* terhadap dilakukan pada program tv mata najwa. Adapun informan pendukung dalam penelitian ini terdiri dari pihak buruh, praktisi, dan wartawan.

Agenda setting memuat isu-isu kebijakan sebagai hasil dari adanya silang pendapat diantara para aktor tentang arah dari suatu tindakan yang kemudian akan ditempuh oleh pemerintah. Isu kebijakan itu ada dikarenakan telah terjadi konflik atau diketahui terdapat perbedaan persepsional diantara baik itu para aktor atau pun suatu situasi problematik yang dihadapi oleh masyarakat di waktu-waktu tertentu. Isu yang dianggap penting di media massa pastinya dianggap penting pula oleh publik. Melalui teori tersebut masyarakat akan tahu tentang isu-isu apa saja dan bagaimana isu-isu itu disusun sesuai dengan tingkat kepentingannya. Adapun pandangan Everett Rogers dan James Dearing (Elfrida, 2016) *agenda setting* merupakan proses liner yang terdiri dari tiga tahapan diantaranya *media agenda*, *public agenda*, dan *policy agenda*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disusun diketahui bahwa *media agenda* pada *omnibus law* cipta kerja memuat 3 aspek, pertama *visibility* bahwa besarnya frekuensi topik yang ditayangkan memberikan pengaruh terhadap minat publik akan serangkaian permasalahan ketenagakerjaan yang menjadi sorotan akibat pertentangan beberapa pasal, kedua *audience salience* bahwa relevansi topik pemberitaan menimbulkan berbagai sudut pandang yang dapat memicu kebingungan publik terhadap kebenaran dari kebijakan tersebut, dan ketiga *valance* bahwa cara mata najwa dalam mengelola pemberitaannya mampu menarik atensi publik untuk mengetahui lebih mendalam seputar *omnibus law* cipta kerja.

Kata Kunci: *Agenda Setting, Framing, Omnibus Law*